

ANALISIS REGIONAL BALANCE DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Siska Amelia¹, Guswandi¹

¹Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

e-mail: amelie93028@gmail.com

Abstrak

Pengembangan wilayah jika disertai dengan masalah penurunan distribusi pendapatan, peningkatan jumlah pengangguran, peningkatan jumlah keluarga miskin serta kerusakan sumberdaya alam akan menjadi paradoks serta mengarah pada terjadi kemunduran pembangunan di wilayah. Untuk mengatasi kemunduran pembangunan sangat diperlukan menentukan dan menghitung indikator kinerja yang mampu menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan pembangunan adalah terjadi pemerataan, keberimbangan, dan keadilan (equity). Distribusi pendapatan dan regional balance merupakan indikator yang digunakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur distribusi pendapatan dan regional balance di Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah dengan menghitung Gini Ratio dan Indeks Williamson. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data jumlah penduduk kabupaten/kota, jumlah pengeluaran penduduk kabupaten/kota, dan pendapatan perkapita penduduk. Hasil analisis memperlihatkan Gini Ratio Sumatera Barat tinggi sebesar 0.79. Hal tersebut bermakna terjadi ketimpangan distribusi pendapat di Sumatera Barat. Hasil perhitungan Indeks Williamson memperlihatkan disparitas wilayah Sumatera Barat rendah sebesar 0.31. Hal tersebut bermakna tidak terjadi ketimpangan wilayah dan terjadi pemerataan pembangunan wilayah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Untuk mengatasi terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi tersebut sangat diperlukan peran pemerintah untuk membuka peluang-peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kata kunci: pengembangan wilayah; distribusi pendapatan, disparitas wilayah, Gini Ratio, Index Williamson

Abstract

Regional development if accompanied by problems of decreased income distribution, increased unemployment, increased number of poor families and damage to natural resources will become a paradox and lead to a decline in development in the region. To overcome development setbacks, it is necessary to determine and calculate performance indicators that are able to describe the level of achievement of a predetermined goal. One of the goals of development is equity, balance and justice. Income distribution and regional balance are indicators used to realize these development goals. This study aims to measure income distribution and regional balance in West Sumatra Province. The method used is to calculate the Gini Ratio and the Williamson Index. The data used is secondary data in the form of data on the population of districts/cities, the amount of expenditure of the population of the district/city, and per-capita income of the population. The results of the analysis show that the Gini Ratio for West Sumatra is high at 0.79. This means that there is an imbalance in the distribution of opinions in West Sumatra. The results of the Williamson Index calculation show that the disparity in the West Sumatra region is low at 0.31. This means that there is no regional inequality and there is an even distribution of development in the districts/cities in West Sumatra. To overcome the occurrence of high-income distribution inequality, the government's role is needed to open up business opportunities to increase people's income.

Key words: regional development; income distribution, regional balance, Gini Ratio, Index Williamson

PENDAHULUAN

Komponen dasar yang merupakan basis konseptual dan pedoman praktis pengembangan wilayah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus memenuhi tiga hal, yaitu 1) kecukupan (sustainance) dalam memenuhi kebutuhan pokok; 2) meningkatkan jati diri (self-esteem) masyarakat; 3) kebebasan (freedom) untuk memilih (Todaro & Smith, 2012; Nugroho & Dahuri, 2004). Pengembangan wilayah diarahkan untuk menciptakan equity (pemerataan, keadilan dan keberimbangan), growth (produktifitas, efisiensi dan pertumbuhan) serta keberlanjutan (sustainability) yang berimbang dalam pembangunan (Rustiadi et al., 2018). Pengembangan wilayah merupakan langkah-langkah yang sistematis yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, meningkatkan kesejahteraan (Fudge et al., 2021), meningkatkan daya saing wilayah serta mengurangi ketimpangan wilayah (Kumari & Devadas, 2017; Jhingan, 2016). Perencanaan dan pengembangan wilayah memiliki sifat berorientasi kewilayahah, futuristik serta berorientasi publik (Rustiadi et al., 2018).

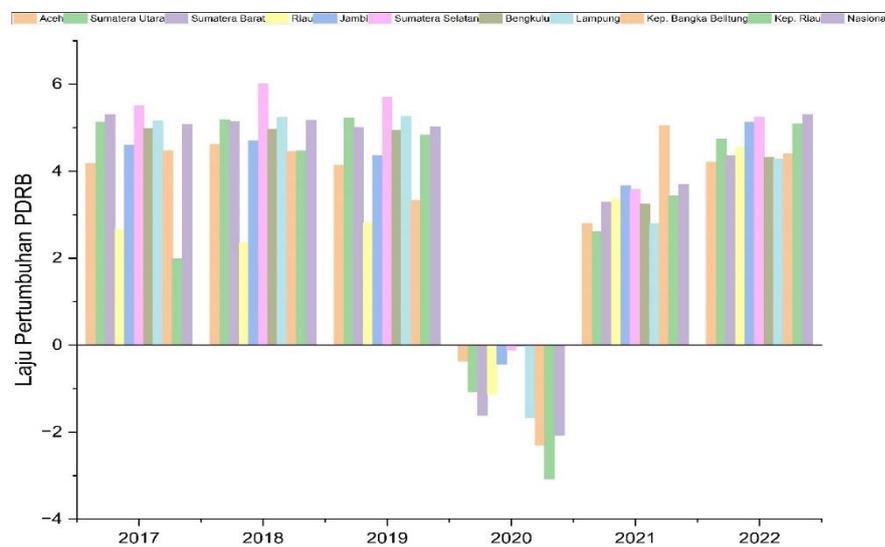
Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur yang penting dalam menilai perekonomian suatu wilayah serta tujuan pembangunan wilayah (Todaro & Smith, 2012) yang mencakup aspek sumberdaya dan interaksi serta interelasi antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi dalam upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan sangat diperlukan pengenalan terhadap potensi-potensi sumberdaya yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan (Zasada et al., 2018). Pertumbuhan ekonomi wilayah yang tinggi pada umumnya dianggap wilayah memiliki kinerja pembangunan yang baik. Namun jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut disertai munculnya berbagai masalah seperti penurunan distribusi pendapatan, jumlah pengangguran semakin meningkat, peningkatan jumlah keluarga di bawah garis kemiskinan serta kerusakan sumberdaya alam akan berdampak paradoks serta mengarah pada kemunduran pembangunan itu sendiri (Rustiadi et al., 2018).

Proses-proses pembangunan harus mengarah pada peningkatan kapasitas sumberdaya pembangunan, sehingga perlu dikembangkan indikator-indikator yang mampu menggambarkan kapasitas sumberdaya pembangunan. Indikator-indikator yang digunakan untuk mewujudkan salah satu tujuan pembangunan yaitu equity (pemerataan, berimbang dan keadilan) adalah dengan melihat distribusi pendapatan (gini ratio, struktural), tingkat pengangguran (pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, setengah pengangguran), tingkat kemiskinan (good-service ratio, persentase konsumsi makanan, garis kemiskinan), regional balance (primacy index, entropy, indeks Williamson, sentral balace, capital balance, sector balance). Aspek pemerataan pendapatan masyarakat dan wilayah menjadi salah satu tolak ukur pembangunan dengan indikator diantaranya adalah gini ratio dan indeks Williamson. Gini ratio merupakan ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) sampai satu (ketimpangan sempurna) (Muta'ali, 2015). Sedangkan indeks Williamson digunakan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dibandingkan provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera. Hal tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB provinsi yang tidak mengalami gejolak yang fluktuatif. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera. Rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumbar dalam lima tahun terakhir (tahun 2017 sampai tahun 2022) adalah 3.58 sedangkan rata-rata laju pertumbuhan PDRB nasional sebesar 3.70. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah

satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam membangun daerah, sesuai dengan tujuan pembangunan untuk mencapai produktivitas, efisiensi dan pertumbuhan (Growth). Wilayah dengan PDRB tinggi dianggap sebagai wilayah dengan tingkat perekonomian atau pendapatan yang tinggi. Indikator lain yang dijadikan sebagai keberhasilan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan demi terwujudnya pemerataan, keberimbangan dan keadilan (Equity) adalah distribusi pendapatan, ketenagakerjaan/pengangguran, kemiskinan dan Regional Balance (Rustiadi et al., 2018).

Laju pertumbuhan PDRB provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sangat fluktuatif (Gambar 1). Laju pertumbuhan PDRB di semua provinsi mengalami penurunan pada tahun 2020, hal tersebut dikarenakan adanya Covid-19 (Gambar 1). Laju pertumbuhan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021, serta terus meningkat pada tahun 2022. Rata-rata laju pertumbuhan PDRB tertinggi dalam lima tahun terakhir (tahun 2017 sampai tahun 2022) adalah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 4.32% lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 3.70%, diikuti oleh Provinsi Bengkulu sebesar 3.74%, Provinsi Jambi sebesar 3.67%, Provinsi Sumut sebesar 3.63 % dan Provinsi Sumbar sebesar 3.58%.



Gambar 1. Laju pertumbuhan PDRB tahun 2017 sampai 2022

Gini Ratio dan Index Williamson merupakan indikator-indikator operasional yang digunakan untuk melihat pemerataan di suatu wilayah untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Aspek pemerataan menjadi salah satu tolah ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan. Gini Ratio digunakan untuk melihat pemerataan distribusi pendapatan yang mencerminkan sampai sejauh mana kue-kue pembangunan dibagi-bagikan kepada masyarakat (Muta'ali, 2015). Index Williamson merupakan indikator operasional yang digunakan untuk melihat keberimbangan pembangunan wilayah (regional balance). Pengukuran berdasarkan variasi hasil-hasil pembangunan ekonomi antar wilayah adalah besaran PDRB. Kriteria pengukuran adalah semakin besar nilai indeks yang menunjukkan variasi produksi ekonomi antar wilayah semakin besar pula tingkat perbedaan ekonomi masing-masing wilayah dengan rata-ratanya. Sebaliknya, semakin kecil nilai tersebut menunjukkan pemerataan antar wilayah cukup baik.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan yaitu terwujudnya pemerataan, keberimbangan dan keadilan (equity) sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan antar wilayah diperlukan prioritas pembangunan yang dilakukan pemerintah. Selain itu juga perlu untuk melihat pemerataan distribusi pendapatan masyarakat serta disparitas antar wilayah. Penelitian ini dilakukan untuk melihat distribusi pendapatan dan regional balance di Provinsi Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk melihat gambaran pengembangan wilayah Sumatera Barat. Metode kuantitatif dilakukan dengan mengkaji berbagai penelitian yang terkait dengan pengembangan wilayah, distribusi pendapatan serta ketimpangan wilayah (Williamson Index). Informasi dan data yang dikumpulkan adalah data jumlah penduduk per-kabupaten, pengeluaran penduduk, serta pendapatan perkapita masyarakat. Data dan informasi yang dikumpulkan merupakan data pada 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu data provinsi dan kabupaten/kota dalam angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. Alat analisis yang digunakan adalah analisis Indeks Gini dan Indeks Williamson.

Analisis Indeks Gini adalah alat analisis yang digunakan untuk melihat distribusi pendapatan di suatu wilayah. Gini Ratio merupakan ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisaran nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Nilai Gini Ratio yang tinggi menunjukkan tingkat distribusi pendapatan yang lebih buruk, sedangkan Gini Ratio rendah menunjukkan tingkat distribusi pendapatan yang lebih baik (Muta'ali, 2015; Rustiadi et al., 2018).

Spesialisasi adalah metode analisis yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur perilaku dinamika kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Indeks spesialisasi bertujuan untuk melihat sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan salah satunya dengan melihat penyerapan tenaga kerja sehingga akan terlihat adanya spesialisasi sektor. Model Indeks Spesialisasi berguna untuk menganalisis tingkat konsentrasi sektor kegiatan secara relatif di suatu wilayah jika dibandingkan dengan wilayah lain yang lebih luas (Muta'ali, 2015).

Formulasi:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f P_i (F_{ci} + F_{ci-1}) \dots\dots\dots (1)$$

keterangan:

- GR = Koefisien Gini
- $f P_i$ = frekuensi penduduk dalam kelas ke-i.
- F_{ci-1} = frekuensi kumulatif dan total pengeluaran pada kelas ke-i-1
- F_{ci} = frekuensi kumulatif dan total pengeluaran pada kelas ke-i

Interpretasi model Gini Ratio adalah:

Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 sampai dengan 1.

Jika GR = 0 atau mendekati 0, maka tingkat ketimpangan pendapatan penduduk semakin merata atau mendekati pemerataan sempurna (*perfect equality*)

Jika GR = 1 atau mendekati 1, maka tingkat ketimpangan pendapatan penduduk semakin melebar atau mendekati ketimpangan sempurna (*perfect inequality*).

Pengelompokan Gini Ratio menurut Oshima terdiri dari:

- a. GR > 0,5, maka tingkat ketimpangan pendapatan penduduk tinggi.
- b. 0,35 < GR < 0,5, maka tingkat ketimpangan pendapatan penduduk sedang.
- c. GR < 0,35, maka tingkat ketimpangan pendapatan penduduk rendah.

Analisis Indeks Williamson merupakan salah satu indeks yang digunakan untuk melihat ketimpangan pembangunan antar wilayah atau disparitas wilayah. Indeks Williamson digunakan dengan melihat perbandingan PDRB perkapita suatu wilayah dengan jumlah penduduk pada wilayah tersebut. Formulasi Indeks Williamson adalah:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 f_i / n}}{\bar{Y}} \dots\dots\dots (2)$$

keterangan:

- IW = Indeks kesenjangan Williamson
 Y_i = PDRB perkapita wilayah ke- i
 \bar{Y} = PDRB perkapita rata-rata nasional/provinsi/kawasan
 f_i = jumlah penduduk kabupaten/kota ke- i
 n = total jumlah penduduk nasional/provinsi/kawasan

Nilai indeks kesenjangan Williamson antara nol sampai satu ($0 < IW < 1$) artinya semakin besar nilai indeks kesenjangan Williamson maka semakin tinggi kesenjangan antar wilayah. Jika semua $Y_i = \bar{Y}$ maka akan dihasilkan indeks = 0, hal tersebut berarti tidak ada kesenjangan ekonomi antar wilayah. Kriteria disparitas wilayah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Jika $0.1 < IW < 0.35$, maka tingkat disparitas wilayah termasuk rendah.
- Jika $0.35 < IW < 0.50$, maka tingkat disparitas wilayah termasuk sedang.
- Jika $IW > 0.50$, maka tingkat disparitas wilayah tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi pendapatan merupakan tolak ukur yang digunakan untuk melihat merata atau timpang pembagian hasil pembangunan suatu wilayah terhadap penduduknya (Muta'ali, 2015; Rustiadi et al., 2018; Nugroho & Dahuri, 2004). Distribusi pendapatan dapat mengindikasikan penyebaran pembagian pendapatan atau jumlah kekayaan antar penduduk dalam suatu wilayah. Distribusi pendapatan yang tidak merata menggambarkan adanya kesenjangan pendapatan dimana terjadi perbedaan kemakmuran ekonomi antar kelompok penduduk kaya dengan penduduk miskin. Hal yang umum terjadi pendapatan riil masyarakat dari kelompok kaya akan terus bertambah sedangkan penduduk miskin akan terus berkurang. Hal tersebut menggambarkan pendapatan riil dari kelompok masyarakat kaya tumbuh lebih cepat dibandingkan masyarakat miskin. Gini Ratio adalah indikator operasional yang digunakan untuk melihat distribusi pendapatan di suatu wilayah. Salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung distribusi pendapatan tersebut adalah total pengeluaran atau pendapatan masyarakat.

Tabel 1. Distribusi pendapatan berdasarkan Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat

Kab./Kota	Jumlah Penduduk	Pengeluaran	Frek Relatif Penduduk	Frekuensi Kumulatif Penduduk (f_{pk})	Jumlah Pengeluaran	Frek Relatif Pengeluaran	Frek Kumulatif Pengeluaran (F_{pk})	Fci-1	Fci + Fci-1	$f_{pi}^*(F_{ci} + F_{ci-1})$
Kep. Mentawai	88.39	6250.40	0.02	0.02	552472.86	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00
Pesisir Selatan	509.62	9166.80	0.09	0.11	4671584.62	0.08	0.09	-0.07	0.02	0.00
Solok	394.24	10094.60	0.07	0.18	3979695.10	0.07	0.15	-0.13	0.02	0.00
Sijunjung	237.31	10303.00	0.04	0.22	2445004.93	0.04	0.19	-0.18	0.02	0.00
Tanah Datar	373.69	10532.20	0.07	0.29	3935777.82	0.07	0.26	-0.24	0.02	0.01
Padang Pariaman	433.02	10940.80	0.08	0.36	4737585.22	0.08	0.34	-0.32	0.02	0.01
Agam	534.20	9594.00	0.10	0.46	5125114.80	0.09	0.42	-0.41	0.02	0.01
Lima Puluh Kota	385.63	9551.40	0.07	0.53	3683306.38	0.06	0.48	-0.47	0.02	0.01
Pasaman	303.10	8317.00	0.05	0.58	2520882.70	0.04	0.53	-0.51	0.02	0.01
Solok Selatan	184.85	10257.40	0.03	0.62	1896080.39	0.03	0.56	-0.54	0.02	0.01
Dharmasraya	231.22	11213.60	0.04	0.66	2592808.59	0.04	0.60	-0.58	0.02	0.01
Pasaman Barat	436.31	8999.80	0.08	0.74	3926702.74	0.07	0.67	-0.65	0.02	0.01
Padang	913.45	14403.60	0.16	0.90	13156968.42	0.22	0.89	-0.87	0.02	0.02
Kota Solok	74.47	12052.60	0.01	0.91	897557.12	0.01	0.90	-0.88	0.02	0.02

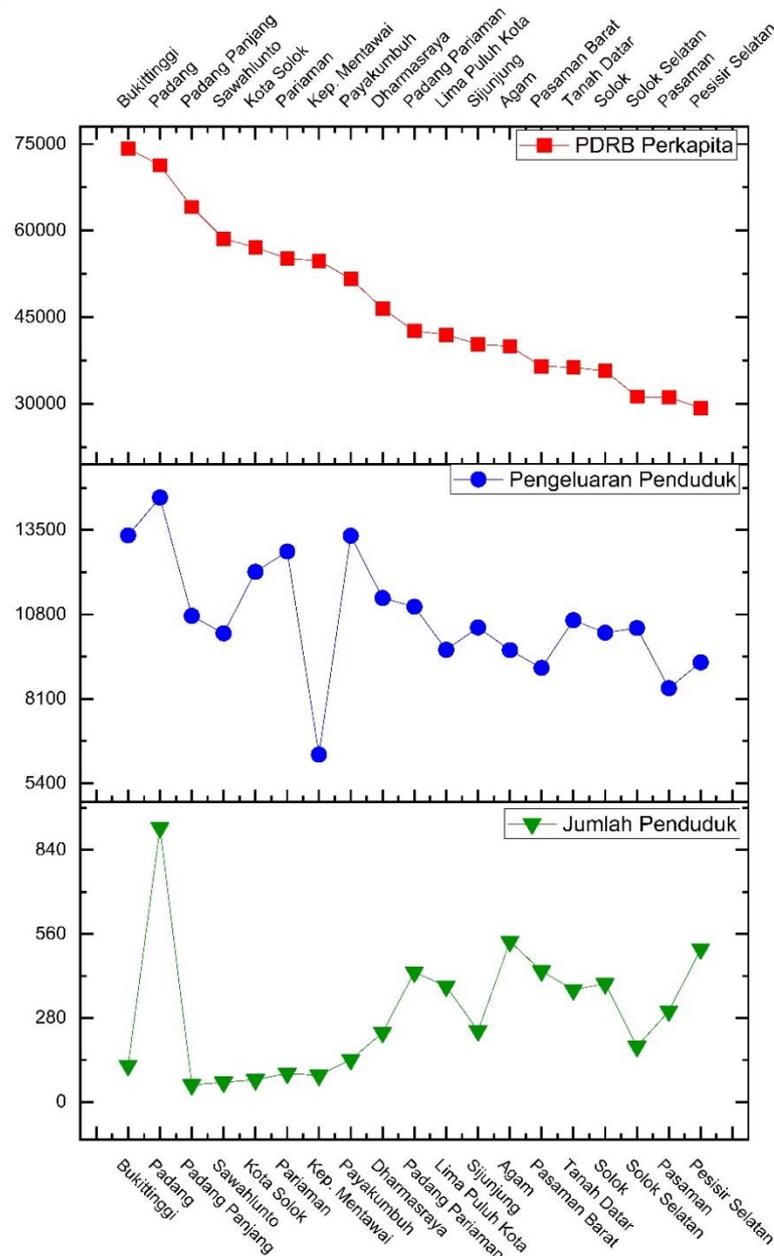
Kab./Kota	Jumlah Penduduk	Pengeluaran	Frek Relatif Penduduk	Frekuensi Kumulatif Penduduk (fpi)	Jumlah Pengeluaran	Frek Relatif Pengeluaran	Frek Kumulatif Pengeluaran (Fci)	Fci-1	Fci + Fci-1	fpi*(Fci + Fci-1)
Sawahlunto	65.69	9944.60	0.01	0.93	653260.77	0.01	0.91	-0.89	0.02	0.02
Padang Panjang	56.97	10636.20	0.01	0.94	605944.31	0.01	0.92	-0.90	0.02	0.02
Bukittinggi	121.59	13210.00	0.02	0.96	1606203.90	0.03	0.95	-0.93	0.02	0.02
Payakumbuh	141.18	13206.80	0.03	0.98	1864536.02	0.03	0.98	-0.96	0.02	0.02
Pariaman	95.29	12721.60	0.02	1.00	1212241.26	0.02	1.00	-0.98	0.02	0.02
Sumatera Barat	5580.22				60063727.96					0.21
GR = 1 - 0.209 =										0.79

Tabel 1 memperlihatkan hasil perhitungan distribusi pendapatan berdasarkan indikator operasional Gini Ratio di Provinsi Sumatera Barat. Wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kota Padang dan penduduk terendah adalah Kota Padang Panjang (Gambar 2). Sedangkan wilayah dengan jumlah pengeluaran tertinggi adalah Kota Padang dan pengeluaran terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hasil perhitungan Gini Ratio berdasarkan formula 1 di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan nilai indeks sebesar 0.79. Hal tersebut menggambarkan terjadi gap distribusi pendapatan yang cukup besar. Distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Barat memperlihatkan adanya kesenjangan pendapatan dan ketidakmerataan kemakmuran ekonomi antar penduduk.

Tabel 2. Regional Balance berdasarkan Index Willimson Provinsi Sumatera Barat

Kab.Kota	Jumlah Penduduk	PDRB perkapita	fi/n	yi-Y	(yi-Y)^2	
Kep. Mentawai	88.39	54800.47	0.02	7503.58	56303685.64	891843.47
Pesisir Selatan	509.62	29291.58	0.09	-18005.32	324191590.08	29607169.28
Solok	394.24	35715.04	0.07	-11581.86	134139396.17	9476887.21
Sijunjung	237.31	40312.56	0.04	-6984.34	48780996.54	2074509.30
Tanah Datar	373.69	36307.65	0.07	-10989.24	120763451.93	8087153.26
Padang Pariaman	433.02	42619.48	0.08	-4677.41	21878207.00	1697728.98
Agam	534.20	39961.45	0.10	-7335.45	53808822.68	5151172.01
Lima Puluh Kota	385.63	41992.10	0.07	-5304.80	28140853.23	1944718.53
Pasaman	303.10	31122.57	0.05	-16174.33	261608966.92	14209776.29
Solok Selatan	184.85	31257.66	0.03	-16039.24	257257195.11	8521884.89
Dharmasraya	231.22	46521.34	0.04	-775.55	601482.88	24922.83
Pasaman Barat	436.31	36515.04	0.08	-10781.86	116248492.56	9089315.44
Padang	913.45	71355.27	0.16	24058.37	578805320.11	94747110.27
Kota Solok	74.47	57095.37	0.01	9798.48	96010178.36	1281289.62
Sawahlunto	65.69	58619.24	0.01	11322.34	128195417.57	1509108.42
Padang Panjang	56.97	64088.44	0.01	16791.54	281955814.15	2878564.42
Bukittinggi	121.59	74237.72	0.02	26940.83	725808066.51	15814968.37
Payakumbuh	141.18	51642.24	0.03	4345.34	18881969.45	477715.30
Pariaman	95.29	55185.82	0.02	7888.93	62235155.47	1062751.64
Sumatera Barat	5580.22	47296.90				208548589.52
						14441.21
Index Williamson						0.31

Tabel 2 memperlihatkan hasil perhitungan disparitas wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Wilayah dengan PDRB perkapita terbesar adalah Kota Bukittinggi sebesar 74,237.72 juta rupiah dan wilayah dengan pendapatan perkapita terendah adalah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 29,291.58 juta rupiah (Gambar 2). Hasil perhitungan memperlihatkan Index Williamson Provinsi Sumatera Barat berdasarkan formula 2 adalah 0.31. Berdasarkan pengelompokan disparitas wilayah dapat dikatakan Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat disparitas wilayah yang rendah. Hal tersebut bermakna bahwa cenderung terjadi pemerataan pembangunan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hal tersebut dapat terjadi salah satunya disebabkan karena Sumatera Barat tidak memiliki sumber daya alam berupa bahan tambang. Wilayah dengan sumberdaya alam yang berlimpah berupa bahan tambang dan minyak bumi cenderung memiliki tingkat keberagaman antar wilayah yang besar (Rustiadi et al., 2018).



Gambar 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, pengeluaran penduduk dan jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat

KESIMPULAN

Perencanaan pembangunan wilayah memerlukan batasan yang dapat digunakan secara operasional untuk mengukur tingkat perkembangan wilayah. Pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah jika disertai dengan masalah penurunan distribusi pendapatan, peningkatan jumlah pengangguran, peningkatan jumlah keluarga miskin serta kerusakan sumber daya alam akan menjadi paradoks serta mengarah pada terjadi kemunduran pembangunan di wilayah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut sangat diperlukan untuk menentukan dan menghitung indikator kinerja yang mampu menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Aspek ekonomi merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan indikator pembangunan wilayah.

Pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah tidak selamanya diikuti oleh pemerataan pendapatan maupun pemerataan pembangunan ekonomi. Ketimpangan pembangunan wilayah (distribusi pendapatan dan disparitas wilayah) selalu muncul dan cenderung semakin melebar. Kecenderungan tersebut menunjukkan pembangunan pada wilayah maju cenderung lebih cepat jika dibandingkan dengan daerah lain. Hal tersebut dalam jangka panjang akan menyebabkan disparitas yang semakin melebar (Arsyad, 2016; Fauzi, 2006). Semakin meningkatnya disparitas antar daerah juga dapat disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang dijalankan pada masa lalu, program pembangunan yang bersifat sentralistis (Rustiadi et al., 2018).

Hasil perhitungan distribusi pendapatan berdasarkan nilai Gini Ratio memperlihatkan nilai sebesar 0.76. Berdasarkan pengelompokan Gini Ratio menurut Oshima, tingkat ketimpangan pendapatan individu Provinsi Sumatera Barat tinggi. Hal tersebut menggambarkan terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat. Tidak semua masyarakat menikmati hasil pembangunan di Sumatera Barat. Untuk mengatasi terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi tersebut sangat diperlukan peran pemerintah untuk membuka peluang-peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan dan membina UMKM.

Hasil perhitungan disparitas wilayah (Regional Balance) berdasarkan perhitungan Indeks Williamsom memperlihatkan nilai sebesar 0.31. Hal tersebut menggambarkan disparitas wilayah di Sumatera Barat rendah, tidak terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Disparitas wilayah yang rendah salah satunya disebabkan Provinsi Sumatera Barat tidak mempunyai sumber daya alam berupa bahan tambang dan minyak bumi sehingga memperkecil terjadinya ketimpangan pembangunan. Pembangunan yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat cenderung merata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini berisi ucapan terima kasih kepada sponsor atau pendonor dana, atau kepada pihak-pihak yang secara penting berperan dalam pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan* (Lima). UPP STMIK YKPN.
- Fauzi, A. (2006). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Gramedia PustakaUtama.
- Fudge, M., Ogier, E., & Alexander, K. A. (2021). Emerging functions of the wellbeing concept in regional development scholarship: A review. *Environmental Science and Policy*, 115(July 2020), 143–150. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.10.005>

- Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Translate). RajaGrafindo Persada.
- Kumari, R., & Devadas, V. (2017). Modelling the dynamics of economic development driven by agricultural growth in Patna Region, India. *Journal of Economic Structures*, 6(1).
<https://doi.org/10.1186/s40008-017-0075-x>
- Muta'ali, L. (2015). *Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan* (1st ed.). Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGE) UGM.
- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2004). *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan* (Cet.1). LP3ES.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah* (4th ed.). Yayasan Pustaka Obor.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic development* (11th ed). Addison-Wesley.
- Zasada, I., Weltin, M., Reutter, M., Verburg, P. H., & Piorr, A. (2018). EU's rural development policy at the regional level – Are expenditures for natural capital linked with territorial needs? *Land Use Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.05.053>